

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir, M. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Handoyo, E. (2010). *Etika politik*. Semarang: Widya Karya.
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Rajawali Pers.
- Kamis, M. (2014). *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden pasca-amandemen UUD 1945*. Jakarta: Setara Press.
- Kelly, N., & Ashiagbor, S. (2011). *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Washington DC: National Democratic Institute.
- Mahfud MD, M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, F. (1998). *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad, & Prasetyo, T. (2018). *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*. Kaukaba.

Ni'matul Huda, & Nasef, M. I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.

Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Strong, C. F. (2004). *Konstitusi-Konstitusi Politik modern: Kajian tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Jakarta: Nusamedia.

Zoelva, H. (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL, PROSIDING & SKRIPSI

Amir, M., & Hertanto, D. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik*, 6(2).

Amsari, F. (2021). Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Laporan Hasil Riset Pusako FH Universitas Andalas dan Komisi Pemilu RI*.

Anisa, L. N. (2015). Implementasi Prinsip Neutrality dalam Proses Mediasi. *Al AMIR Mabsut*, 9(1).

Ansar, L., & Hasmiyati. (2023). Analisis Kedudukan Presiden terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif HTN dan HAN. *Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(2).

Badruzzaman, Z., & Yani, A. (2024). Problematika Hukum Netralitas Presiden dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(2).

Baihaqi, M. I. (2024). Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*).

Budiman. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1).

Damaitu, E. R., & Kautsar, C. A. (2023). Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia melalui Peradilan Etik. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2).

Fathumulloh, B. (2024). Antara Pemilu dan Etika: Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia. *Prosiding*

Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2(5).

- Faturrachman, M. S. Y., & Nurwina. (2024). Tinjauan Terhadap Tindakan Petahana Dalam Pemilihan Umum: Perbedaan Konsep Penyalahgunaan Kewenangan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum Unhas, 2(1).*
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Rerentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1).*
- Hatim, A., Harijanti, S. D., & Taufik, G. A. (2024). The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision: Gagasan Pembatasan masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision. *Jurnal Konstitusi, 21(4).*
- Hertanto, A. & Maryanah, T. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Social Issues (JGSI), 2(1).*
- Hilmi, M., Nuryanto, D., Rahma, F., & Syifa, V. (2023). Gen Z Voter Behavior in the 2024 Presidential Election: A Virtual Ethnographic Study on the Instagram Accounts of Presidential Candidates. *Islamic Communication Journal, 8(2).*
- Idris, S. (2024). Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).*
- Jabar, S. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(12).*
- M. Anggrita, A., Kusuma, H. N., & Rizkika, S. (2023). Dinamika manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membangun asas netralitas menjelang Pemilihan Umum 2024. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2).*
- Millah, A. (2024). Etika politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta demokrasi Pemilihan Umum. *UNES Law Review, 7(1).*
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas ASN dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau, 1(1).*
- Mutawalli, M. (2024). Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(2).*

- Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2).
- Prasetyo, Y. (2024). Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum dalam Mewujudkan Supremasi Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 11(2).
- Pratiwi, J. I., Salama, N., & Ulfah, S. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Purwanto, I., & Maskur. (2025). Analisis Keberpihakan Presiden dalam Kampanye Politik Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1).
- Purwantoro, T. P., Masyeh, M., & Thesti, T. Y. N. (2025). Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1).
- Rasiana, R., et al. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara menjelang Pesta Demokrasi 2024. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1).
- Riora, M., Kencana, U., & Budianto, K. (2020). Netralitas politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Wajah Hukum*, 4(2).
- Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3).
- Rizkianataa, B. I. (2024). Perluasan Praktik Pork-Barrel dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(1).
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. B. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2).
- Silalahi, W. (2021). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1).
- Sofni, A. (2025). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam. *Journal of Law and Legal System*, 1(1).

Suryanata, A. R., & Mubarrak, M. Z. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum. *UNES Law Review*, 6(4).

Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4).

Widya, U. (2022). Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca Perubahan. *Lex Renaissance*, 7(1).

Yusuf, M. R. (2024). Praktik Abusive Executive Power Pada Pemilu 2024: Implikasinya terhadap Demokrasi Indonesia dan Upaya Memulihkannya. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1).

Zuhro, R. S. (2021). Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkualitas Dan Berintegritas. *Jurnal Pengawasan Pemilu*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar 1945 Buku IV Jilid 1 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar 1945 Buku V tentang Pemilihan Umum.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017.

D. SUMBER ELEKTRONIK

Ady, T. D. A. (2024, Januari 30). *Akademisi HTN UGM: Presiden Berkampanye-Memihak Munculkan Komplikasi Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-htn-ugm--presiden-berkampanye-memihak-munculkan-komplikasi-hukum-lt65b87ecb5ca5a/?page=all>. Diakses pada 17 Agustus 2025.

Basyari, I., & Harbowo, N. (2021, Oktober 13), *Seleksi KPU-Bawaslu, Independensi, dan Jejaring Afiliasi*, <https://www.kompas.id/artikel/tim-seleksi-kpu-bawaslu-independensi-dan-jejaring-afiliasi>. Diakses pada 19 Agustus 2025.

Basyari, I., & Kumalasanti, S. R. (2024, April 22). *MK: Perlu Perubahan Paradigma Netralitas Eksekutif, Presiden Harus Tahan Diri*. <https://www.kompas.id/artikel/mahkamah-konstitusi-perlu-perubahan-paradigma-mengenai-netralitas-kekuasaan-eksekutif>. Diakses pada 16 Agustus 2025.

Feisal, R. (2023, Desember 17). *Mahfud minta Bawaslu dan KPK selidiki dugaan transaksi janggal Pemilu*. <https://www.antaraneews.com/berita/3875247/mahfud-minta-bawaslu-dan-kpk-selidiki-dugaan-transaksi-janggal-pemilu>. Diakses pada 17 Agustus 2025.

Huzaini, M. D. P. (2025). *Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-kualitas-produk-legislasi-rendah-pemerintahfokusharmonisasiregulasi-lt59f13bb6e2702/>. Diakses pada 10 Agustus 2025.

Indri. (2024, Februari 26). *KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024*. <https://dialeksis.com/nasional/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>. Diakses pada 20 Agustus 2025.

- Kaban, H. D. K. (2023, Desember 30). *Sekjen KIPP: Bawaslu dan KPU harus Independent dari intervensi*, <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/400137/sekjen-kipp-bawaslu-dan-kpu-harus-independen-dari-intervensi>. Diakses pada 19 Agustus 2025.
- Mashabi, S., & Krisiandi. (2021, Oktober 12). *Mendagri Tegaskan Tak akan Intervensi Kerja Timsel KPU-Bawaslu* <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/17335631/mendagri-tegaskan-tak-akan-intervensi-kerja-timsel-kpu-bawaslu>. Diakses pada 19 Agustus 2025.
- Munawaroh, N. (2024, Februari 7). *Hukumnya Presiden Memihak dalam pemilu. Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-a-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65c2b45d85aa5>. Diakses pada 30 April 2025.
- Purba, G. N. (2024, Januari 31). *Anggaran Bansos Rp496 Triliun Disetujui DPR*. <https://www.metrotvnews.com/play/NLMC2wvP-anggaran-bansos-rp496-triliun-disetujui-dpr>. Diakses pada 02 Agustus 2025.
- Ramadhan. Ardito, Mantalean, V., & Farisa, F. C. (2024, Februari 1). *Ahli Sebut Para Pakar Sudah Wanti-wanti soal Pj Kepala Daerah, tapi Jokowi Tak Peduli*. https://nasional.kompas.com/read/2024/04/01/16203931/ahli-sebut-para-pakar-sudah-wanti-wanti-soal-pj-kepala-daerah-tapi-jokowi?page=all#google_vignette. Diakses pada 15 Agustus 2025.
- Safitri, E. (2024, Januari 26). *Jokowi bawa kertas besar, tunjukkan aturan soal presiden boleh kampanye*. detikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7162237/jokowi-bawa-kertas-besar-tunjukkan-aturan-soal-presiden-boleh-kampanye>. Diakses pada 29 April 2025.
- Saputro, J. S. (2025, Juli 27). *Pentingnya netralitas pegawai ASN. Badan Pembinaan Hukum Nasional*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=599>. Diakses pada 27 Juli 2025.
- Syatta, A. R. M. (2024). *Netralitas Presiden dalam pemilu: Ambisi Kekuasaan, Demokrasi menjadi Taruhan*. Lembaga Kajian Keilmuan FHUI. <https://lk2-fhui.com/netralitas-presiden-dalam-pemilu-ambisi-kekuasaan-demokrasi-menjadi-taruhan/>. Diakses pada 25 Juli 2025.
- Syafi'ie, M. (2024). *Regresi Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://law.uui.ac.id/blog/2023/12/22/regresi-demokrasi>. Diakses pada 14 Agustus 2025.